

Sinergi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Semarang

Herbasuki
Hardi Warsono
Departemen Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro, Semarang
e-mail: hardie_wsn@yahoo.com

Abstrak

Tujuan pengembangan pariwisata selain untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat juga diharapkan menjadi sektor potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Studi ini menjelaskan berbagai kontradiksi yang terjadi dalam membangun kolaborasi di bidang pariwisata, sehingga sinergi pemerintah dalam pariwisata menjadi fokus utama dalam *paper* ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan kesimpulan mendalam dan disparitas kelompok sasaran dalam kerangka triangulasi melalui sumber yang dipilih dalam pengumpulan data, serta taksonomi dalam teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah menjadi program prioritas pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengembangan destinasi wisata dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan meliputi revitalisasi obyek wisata, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya pelaksana pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat. Perkembangan destinasi wisata akan dilakukan di kawasan Candi Gedongsongo, Bak Mandi Muncul, Umbul Senjoyo dan Bukit Cinta/Bukit Brawijaya. Namun dalam implementasinya belum memberikan hasil yang optimal. Kata kunci: tujuan wisata, sinergi pemerintah, pemberdayaan

Synergy Development Of Tourism Destination In Semarang District

Abstract

The purpose of tourism development in addition to improving community empowerment is also expected to be a potential sector in increasing local revenue. This study illustrates the various contradictions that occur in building collaboration in the field of tourism, so that Tourism Collaborative Governance is the main focus in this paper. The study was conducted using a qualitative approach, with in-depth interview and focus group discussion within the framework of source triangulation selected in data collection, as well as taxonomy into the choice of data analysis techniques. The research indicates that the district government of Semarang has included the tourism sector in its priority development program. The development of tourism destinations is done in cooperation with various stakeholders. Plans of development activities to be undertaken include: revitalization of tourism objects, infrastructure improvements, quality improvement of tourism implementing resources and community empowerment. The development of tourism destinations will mainly be done in the area of Gedongsongo Temple, Muncul bath, Umbul Senjoyo and Bukit Cinta/Bukit Brawijaya. But in the implementation has not provided optimal results.

Keywords : tourist destinations, collaborative governance, and empower

Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor unggulan dan memegang peranan penting dalam pembangunan di Indonesia. Pariwisata di samping merupakan sektor penggerak perekonomian juga sebagai wahana untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Schumacher (2007) : *“Tourism is the leading and the single largest industry in the world of today. This sector has been recognized as one of the main important service industries in the world”* (Bhuiyan et. all. : 2013). Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa : *“Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.”*

Kebijakan pengembangan pariwisata harus dipandang sebagai bagian integral pembangunan nasional dan tidak boleh merusak tatanan budaya lokal maupun kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Liu & Wall (2006) mengatakan : *“Tourism is a potential matter in social, environmental and economic levels of many government agendas. Government sees tourism as a tool of development giving priority to protect the environments and traditions with minimum negative impacts”* (Bhuiyan et. All : 2013). Dalam rangka pelaksanaan undang-undang pemerintah telah menyusun PP No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025. PP No 50 Tahun 2011 menyebutkan :

“Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha”.

Berdasarkan UU No 10 Tahun 2009 dan PP No 50 Tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Perda No 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang berdasarkan pada Peraturan Bupati No 111 tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2030. Sebagai sebuah sistem pariwisata bersifat multidimensi dan melibatkan interaksi *stakeholders*. Sebagai sebuah sistem pariwisata mengandung empat elemen seperti dikatakan Christie Mill & Morrison (1985) *“the system in tourism has four parts, which are marketed, travel, destination and marketing, and to them, the system is considered as a spider’s web in which all parts will vibrate if have a part of it is touched “* (Annuar, et all : 2012). Destinasi pariwisata perlu lebih dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Diperlukan inovasi dalam pengembangan destinasi wisata. Seperti halnya penegasan Eva Sørensen & Jacob Torfing (2012) berikut :

Innovation helps private companies to cut costs, improve their products and open new markets. Failure to innovate is often fatal as private firms will gradually lose their competitive edge and face shrinking market shares and profits, before they eventually close down (Eva Sørensen & Jacob Torfing: 2012).

Inovasi tidak hanya diperlukan pada sektor swasta, tetapi sektor publik pun sangat memerlukan inovasi. Schumpeter, (1934, 1946) mengemukakan sebagai berikut : *It is common knowledge that innovation is the key to success for private businesses.*

Banyak kalangan yang skeptis pada kemampuan inovasi pada sektor publik yang selama ini terkenal lamban dan penuh aturan. Sikap skeptis ini juga dikemukakan oleh Eva Dorensen dan Jacob Torfing (2012) sebagai berikut :

When it comes to the public sector there is a lot of skepticism with regard to the capacity for innovating public policies, organizations and services. Many people, and especially a good deal of those employed in the private sector, consider the public sector as a slow-moving bureaucracy characterized by red tape, inertia and stalemate. Indeed, pointing out the lack of dynamism and adaptive change in the public sector was a key part of the neo-liberalist bashing of the public sector in the 1980s.

Kabupaten Semarang memiliki potensi unggulan terutama di bidang industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI). Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Semarang yang mempunyai letak strategis Yogyakarta- Solo-Semarang (Joglosemar) dan potensi serta kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh daerah lain sebagai modal yang harus dikelola dengan seoptimal mungkin. Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang mempunyai peluang untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki, khususnya di bidang pariwisata.

Obyek wisata Kabupaten Semarang tersebar di 12 kecamatan, meliputi wisata alam, wisata budaya/religi, wisata air, wisata industri, wisata rekreasi dan restoran, wisata nostalgia Jawa Tengah dan desa wisata. Persebaran fasilitas akomodasi yang ada di Kabupaten Semarang saat ini baru terkonsentrasi di beberapa kawasan saja seperti di Ungaran Barat, Bandungan, Bawen, Ambarawa dan Getasan khususnya di kawasan Kopeng. Sektor pariwisata yang diwakili oleh berkembangnya lapangan usaha di bidang perdagangan, hotel dan restoran, selain mampu menjadi penyumbang kedua terbesar bagi perekonomian daerah juga merupakan bentuk realita bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Semarang menawarkan sebuah peluang untuk segera dijadikan sektor tulang punggung dalam pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya dengan limpahan sumber dayanya yang masih teramat besar.

Sektor pariwisata merupakan penyumbang ketiga terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Terdapat puluhan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan, namun keterbatasan dana hanya beberapa obyek wisata yang dapat dikembangkan. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Semarang hanya mengelola empat obyek wisata yaitu kawasan Candi Gedongsongo, kawasan Pemandian Muncul, kawasan Umbul Senjoyo dan kawasan Bukit Cinta/Bukit Brawijaya. Obyek wisata yang lain dikelola oleh swasta maupun pemerintah desa.

Permasalahan pembangunan pariwisata di Kabupaten Semarang antara lain rendahnya daya saing objek wisata, rendahnya kualitas produk wisata, baik obyek wisata, penginapan, restoran, transportasi, pelayanan yang tidak prima (AMENITAS – AKSESIBILITAS – ATRAKSI). Adapun masalah dalam pengembangan destinasi pariwisata adalah rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kepariwisataan, lemahnya pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata dan lemahnya

pemberdayaan kelompok sadar wisata serta lemahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pelaku bisnis pariwisata dan masyarakat di sekitar obyek wisata serta lembaga publikasi/informasi pariwisata, dan belum optimalnya pola kemitraan kepariwisataan di Kabupaten Semarang (Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015).

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kebijakan pengembangan destinasi pariwisata dan mengetahui faktor-faktor penghambat pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Semarang. Tipe penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu secara terperinci, yang pada akhirnya akan bermuara pada pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti yakni untuk menghasilkan gambaran mengenai kebijakan pengembangan destinasi pariwisata. Menurut Dunn (2003) tipe penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi pilihan-pilihan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Semarang terletak dijalur strategis pariwisata Solo-Yogyakarta. Sebagai kawasan lintas daerah banyak dikunjungi wisatawan karena kaya akan tempat wisata dan jajanan kuliner yang tidak ditemui di tempat lain, oleh karena itu pariwisata di Kabupaten Semarang mempunyai slogan “Surganya Jawa Tengah”. Posisi strategis Kabupaten Semarang sebagai daerah penyangga Ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan kondisi alamnya memberikan peluang dan kesempatan untuk lebih mengembangkan potensi dibidang pariwisata. Adanya potensi pariwisata yang sangat variatif menjadikan Kabupaten Semarang sebagai tempat tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan mengingat letak yang sangat dekat dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Guna menangkap peluang yang ada Pemerintah Kabupaten Semarang telah menyusun kebijakan pengembangan pariwisata.

Kebijakan pengembangan pariwisata telah tertuang dalam Peraturan Bupati No 111 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2030). Visi pembangunan pariwisata yang tercantum dalam Ripparda adalah “Terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai daerah tujuan wisata regional, nasional dan internasional, yang maju, dinamis dan handal, melalui pemanfaatan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan konsep pelestarian menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata merupakan salah satu program prioritas dalam rencana pembangunan Kabupaten Semarang. Produk pariwisata yang berkualitas dan terintegrasi merupakan daya tarik bagi wisatawan. Wisatawan dengan mudah dapat mengetahui informasi produk pariwisata, sehingga dapat merencanakan destinasi pariwisata yang akan dituju. Pelayanan kepada wisatawan harus ditingkatkan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan teknologi dan harapan/keinginan wisatawan. Keterlibatan masyarakat juga harus ditingkatkan sehingga dapat membantu pemerintah dalam menangkap peluang di bidang pariwisata. Kerjasama yang harmonis dan sinergis antar *stakeholders* perlu digalang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang pada gilirannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi pariwisata beragam yang meliputi : wisata air, sungai, gunung, hutan, candi, kepurbakalaan dan perjuangan seharusnya dapat memberikan kontribusi baik terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Semarang hendaknya dapat membuat terobosan dan inovasi baru dalam peningkatan kualitas produk pariwisata yang tersebar di berbagai kawasan.

Kebijakan pariwisata telah tertuang dalam Ripparda yang berlaku selama 20 tahun dan akan dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi : pembangunan destinasi wisata, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan. Dalam penelitian ini akan hanya akan dibahas kebijakan destinasi pariwisata daerah.

Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Semarang dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan Ripparda tahun 2010 – 2030. Pengembangan destinasi pariwisata daerah dalam penelitian ini berupa obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pengembangan obyek wisata ini diharapkan akan dapat menjadi daya ungkit bagi pengembangan suatu kawasan destinasi pariwisata. Obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Semarang meliputi kawasan Candi Gedongsongo, Pemandian Muncul, kawasan Bukit Cinta/Bukit Brawijaya dan Palagan Ambarawa.

Kebijakan destinasi pariwisata kabupaten telah tertuang dalam Peraturan Bupati No 111 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2030. Kebijakan ini menyalahi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Berdasarkan UU No 10 tahun 2009, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata harus dalam bentuk peraturan daerah bukan dalam bentuk peraturan bupati seperti yang tertuang dalam pasal 9 ayat 3 : “Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Kebijakan destinasi pariwisata Kabupaten Semarang meliputi perwilayahan destinasi pariwisata daerah, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pengembangan usaha pariwisata, pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dan pengembangan investasi di bidang pariwisata. Kebijakan destinasi pariwisata Kabupaten Semarang selaras dengan pendapat Cooper et all (Sunaryo:2013), Buhalis (Yoon:2002).

Komitmen dan peran pemerintah daerah dalam pengembangan obyek wisata sangat strategis. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang telah memasukkan sektor pariwisata dalam program prioritas. Artinya Pemerintah Kabupaten Semarang mengalokasikan dana yang lebih besar dalam program ‘Intanpari yaitu : Industri – Pertanian – Pariwisata’. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) bahwa pemerintah akan menerapkan prinsip uang mengikuti program kerja (*money follow program*) agar dana yang tersedia dapat dialokasikan kepada unit atau bagian yang memiliki program prioritas, terutama yang sesuai dengan kebijakan nasional. Kawasan Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya merupakan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional / KPPN (Lampiran 2 UU No 10 Tahun 2009).

Pemerintah Kabupaten Semarang bertekad untuk menjadikan sektor pariwisata menjadi salah satu daya ungkit bagi sektor lain dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata antara lain : *Land use planning*,

Community development, Education, training and employment (Anuar, Aris Ahmad Nazrin, et all:2012, Brokaj:2014).

Pengembangan destinasi obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Semarang khususnya di kawasan Gedongsongo dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa instansi yaitu : Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Perhutani dan BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya). Koordinasi antar ketiga institusi tersebut berjalan baik. Peran pemerintah daerah sangat strategis dalam pengembangan destinasi pariwisata seperti yang disampaikan Brokaj (2014) bahwa “*that the role of local government is that of driving the sustainable development agenda within the destination sustainable development agenda*”

Pemerintah daerah melalui DPU membuat jalan masuk dan juga gedung parkir, Disporapar mengembangkan kawasan wisata berikut rumah souvenir dengan mengajak UMKM (dibawah pembinaan Disperindag) untuk membuat cendera mata/*merchandise*. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan melakukan pembinaan desa wisata. Ada beberapa desa wisata yang berada atau berdekatan dengan kawasan Candi Gedongsongo seperti : Desa Keseneng dan Desa Kemawi. Pemerintah Kabupaten Semarang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan kawasan Candi Gedongsongo. Bantuan ini dipergunakan untuk pelebaran jalan masuk, penataan *landscape* senilai 1,4 milyar rupiah.

Guna mengembangkan dan mempercantik kawasan Pemandian Muncul, Pemerintah Kabupaten Semarang berusaha mengemas obyek ini menjadi lebih menarik dengan memadukan kondisi alam yang menunjang. Pemandian Muncul direncanakan akan dikembangkan menjadi *waterboom*, dilengkapi dengan kolam renang berstandar internasional. Sumber air dari alam juga yang kemudian membuat air ini sangat bersih sehingga dasar kolam dapat terlihat jelas. Dalam kawasan ini juga akan dilengkapi dengan warung kuliner yang menyajikan makanan yang menggugah selera. Pemerintah Kabupaten Semarang berencana mengembangkan kawasan ini seperti kawasan destinasi wisata seperti Taman Sri Baduga di Situ Buleud (permainan air mancur unik) Purwakarta atau bahkan akan dibuat *Wings of Time* di Singapura (permainan laser).

Konsep pengembangan kawasan Umbul Senjoyo dilakukan dengan melakukan konservasi resapan mata air, diikuti dengan pengembangan obyek wisata alam, religius dan wisata tirta. Berdasarkan konsep tersebut akan dilakukan penataan kolam wisata air dilengkapi dengan fasilitas penunjang lain, seperti : dermaga perahu, kolam rekreasi, kolam ritual dengan pendopo, panggung di atas air , *sitting group* dan *restaurant*.

Pengembangan kawasan Bukit Cinta/ Bukit Brawijaya akan dilengkapi dengan permainan laser. Pemerintah Kabupaten Semarang berencana mengembangkan kawasan ini seperti kawasan destinasi wisata taman Sri Baduga di Situ Buleud (permainan air mancur unik) Purwakarta atau bahkan akan dibuat *Wings of time* di Singapura (permainan laser).

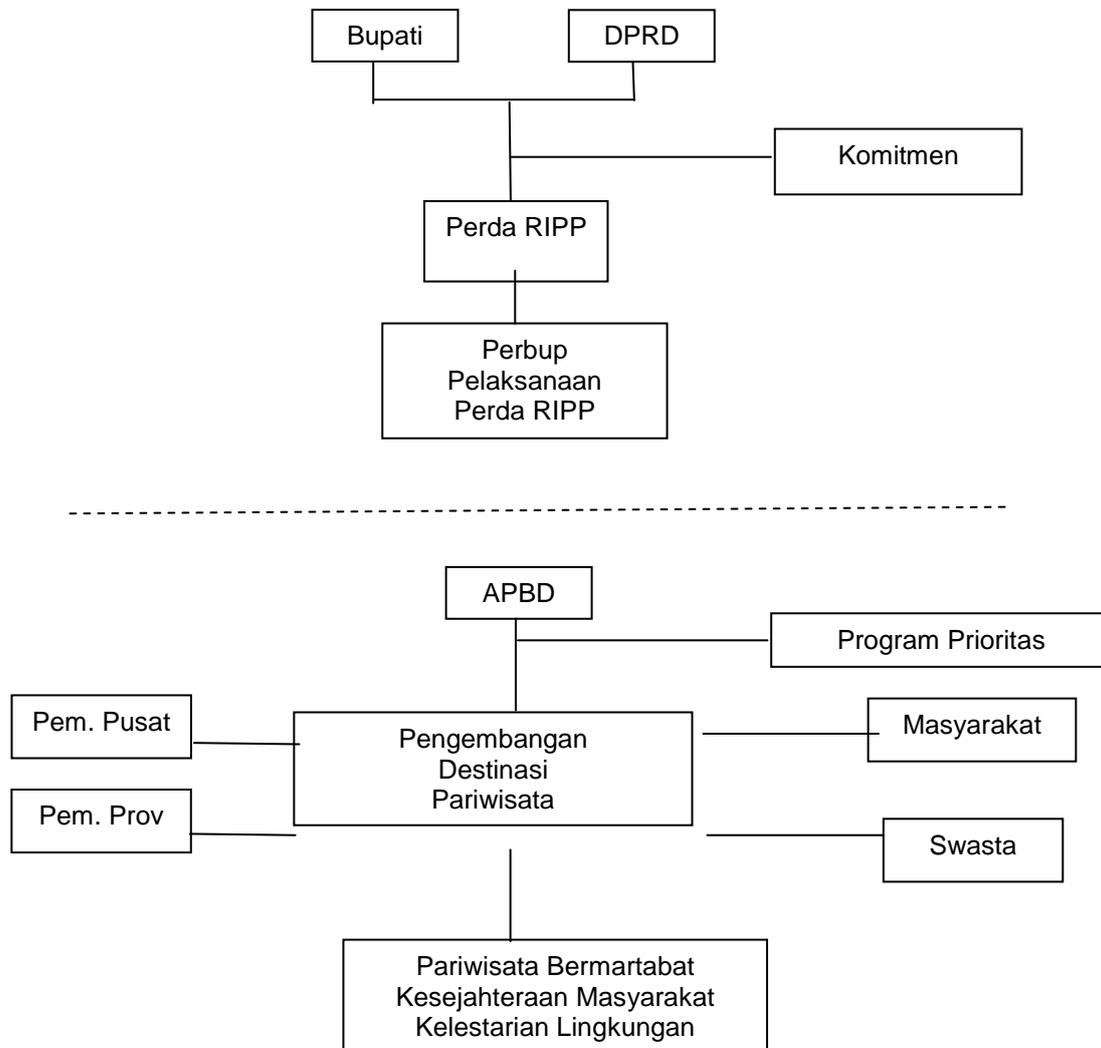
Berikut Gambar 1 yang menjelaskan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Semarang. Dalam pengembangan destinasi pariwisata diperlukan komitmen baik Bupati maupun DPRD. Komitmen diwujudkan dalam bentuk penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah/RPPD. Bupati menyusun peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan RPPD. Berdasarkan perbup tersebut dapat diketahui rencana pengembangan destinasi pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan program prioritas dalam *draft* RPJMD. Konsekuensi sebagai program prioritas adalah alokasi dana yang signifikan dalam pembiayaan pengembangan destinasi pariwisata. Keterlibatan *stakeholders* sangat

dibutuhkan dalam pendanaan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, swasta maupun masyarakat. Apabila terdapat sinergi yang baik diantara pelaku kepariwisataan akan dapat dicapai tujuan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, seperti terlihat dalam Gambar 1.

Gambar 1

Skenario Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Semarang



Pengembangan destinasi pariwisata daerah di Kabupaten Semarang belum optimal karena beberapa hambatan, diantaranya :

- 1) Obyek destinasi pariwisata memerlukan beberapa persyaratan untuk dapat dikunjungi wisatawan, diantaranya kualitas obyek yang bagus dan akses yang mudah serta infrastuktur yang memadai. Infrastruktur sebagai penunjang belum sepenuhnya memadai, walaupun pada tahun ini sudah dimulai perbaikan, seperti yang dilakukan di kawasan Candi Gedongsongo.
- 2) Keterbatasan kualitas sumber daya pelaksana kepariwisataan yang belum memadai, sebagian besar belum dapat memberikan pelayanan secara optimal, karena hal ini menjadi prasyarat penting dalam era

persaingan bebas di kawasan ASEAN (MEA), masyarakat, sehingga slogan ‘Surganya Jawa Tengah’ akan terwujud”.

- 3) Peran serta masyarakat belum optimal di dalam lingkungan kawasan destinasi pariwisata. Masyarakat belum sepenuhnya dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik dalam menerima kedatangan wisatawan. Kesadaran masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam menerima dan melayani wisatawan dengan baik diharapkan akan dapat membawa dampak yang positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Simpulan

Kebijakan destinasi pariwisata kabupaten telah tertuang dalam Peraturan Bupati No 111 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2030. Kebijakan ini menyalahi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Menurut aturan tersebut Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata harus dalam bentuk peraturan daerah bukan dalam bentuk peraturan bupati seperti yang tertuang dalam pasal 9 ayat 3 UU No 10 tahun 2009 : “ Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pengembangan destinasi pariwisata dilakukan secara bertahap dan melibatkan peran semua *stakeholders*, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Komitmen pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan destinasi pariwisata, yaitu dengan memasukkan pariwisata dalam program unggulan Kabupaten Semarang. Pemerintah Kabupaten Semarang berusaha mengalokasikan dana APBD kabupaten yang relatif lebih untuk menjadikan pariwisata sebagai daya ungkit pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengembangan destinasi yang dilakukan yaitu : revitalisasi obyek wisata, perbaikan infrastruktur baik menuju dan di dalam lokasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan destinasi pariwisata terutama akan dilakukan di kawasan Candi Gedongsongo, Pemandian Muncul, Umbul Senjoyo dan Bukit Cinta/Bukit Brawijaya.

Adapun hambatan dalam pengembangan destinasi pariwisata adalah :

- 1) Infrastruktur sebagai penunjang belum sepenuhnya memadai, walaupun pada tahun ini sudah dimulai perbaikan, seperti yang dilakukan di kawasan Candi Gedongsongo.
- 2) Kualitas sumber daya pelaku kepariwisataan yang belum memadai, sebagian besar belum dapat memberikan pelayanan secara optimal, karena hal ini menjadi prasyarat penting dalam era persaingan bebas di kawasan ASEAN (MEA).
- 3) Peran serta masyarakat belum optimal di dalam lingkungan kawasan destinasi. Masyarakat belum sepenuhnya dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik dalam menerima kedatangan wisatawan.

Saran

- 1) Perlu dilakukan evaluasi dan penyusunan kembali Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2030 dalam bentuk peraturan daerah. Komitmen pemerintah daerah harus didukung oleh DPRD sehingga tidak menemui kesulitan dalam perencanaan anggaran.

- 2) Perlu dilakukan perbaikan infrastruktur sehingga akses menuju dan di dalam obyek destinasi pariwisata menjadi lebih nyaman. Untuk perbaikan infrastruktur perlu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- 3) Perlu dilakukan revitalisasi obyek destinasi wisata terutama pada kawasan Candi Gedongsongo, Pemandian Muncul, Umbul Senjoyo dan Bukit Cinta/Bukit Brawijaya dengan melibatkan swasta. Kerjasama dengan pihak swasta perlu dilakukan dengan penerapan model BOT (*Build Owner Transfer*) dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Perlu peningkatan partisipasi masyarakat pariwisata dengan melakukan pembinaan secara periodik melalui kelompok sadar wisata tentang 'Septa Pesona Wisata'. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat menjadi profesional dalam menerima wisatawan dan dapat turut menjaga keberadaan obyek wisata atau ekologi pariwisata dengan baik.
- 5) Perlu dilakukan pembinaan bagi pelaku masyarakat dalam berbagai bidang agar mendapatkan sertifikat sesuai dengan tuntutan MEA.

Daftar Pustaka

- Anuar, A. N. A., et. all. (2012). *The roles of tourism system towards development of tourist friendly destination concept*. Asian Social Science, 8 (6): 146.
- Bhuiyan, M. A. H., et. all. (2013). *Tourism development in malaysia from the perspective of development plans*. Asian Social Science, 9 (9).
- Kim, N. (2013). *Tourism destination competitiveness, globalization, and strategic development from a development economics perspective*, dissertation. University of Illinois at Urbana-Champaign: ProQuest LLC.
- Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027.
- Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2030.
- PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 – 2025.
- Sørensen, E & Torfing, J. (2012). *Introduction collaborative innovation in the public sector*. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 7(1).
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Schumpeter, J. (1934). *The theory of economic development*. Cambridge: Harvard University Press.

Schumpeter, J. (1946). *Economic theory and entrepreneurial history*. Cambridge: Harvard University Press.

UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Yoon, Y. (2002). *Development of a structural model for tourism destination competitiveness from stakeholders' perspectives*. UMI: ProQuest Information and Learning Company.